



Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Nonia Sakka Lebang ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 1, No. 3, Desember 2021
lebangnonia@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lebang, N. S. (2021). Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 99-107.

Abstrak

Pelaksanaan program pembangunan pada dewasa ini harus selalu digerakkan dan diperlancar dalam arti bahwa suatu bidang atau program pemerintah harus selalu berkaitan dengan bidang atau program yang lain, dimana dalam hal ini perlu adanya keterpaduan dan keserasian dalam kebijaksanaan perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian hasil yang akan dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peranan Camat Selaku Koordinator Pembangunan Di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan peranan Camat selaku koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci: Peranan, Camat, Koordinator Pembangunan

Abstract

The implementation of development programs today must always be driven and streamlined in the sense that a government sector or program must always be related to other fields or programs, in which case there is a need for integration and harmony in planning policies and program preparation, implementation and supervision and control. Results to be achieved. This study aims to determine the role of the Camat as a Development Coordinator in Moramo District, South Konawe Regency. From the research results, it can be seen the role of the Camat as development coordinator in Konda District, South Konawe Regency and the factors that become obstacles to the implementation of the Camat's role as development coordinator in Konda District, South Konawe Regency.

Keywords: Role, Camat, Development Coordinator

A. Pendahuluan

Pembangunan kecamatan dan masyarakat pedesaan perlu terus didorong dengan cara meningkatkan pembangunan sektoral, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan sumber daya alam serta menumbuh kembangkan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan kecamatan. Kesemuanya itu difokuskan ke kecamatan, sehingga kecamatan merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan kecamatan yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan kecamatan maka keterlibatan masyarakat secara langsung sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan daerah otomatis oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan Kepala Daerah Otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, daerah Kabupaten dan/atau daerah Kota dibawah Kecamatan. Sedangkan desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa Camat disamping sebagai pelaksana pembangunan di berbagai bidang, ia juga dapat memecahkan berbagai masalah yang ada dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa tujuan ideal desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Smith di atas tidak dengan serta merata dapat dicapai hanya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, untuk mencapai atau paling tidak mendekati tujuan tersebut, seperti:

1. Dari Pemerintah pusat dan dari Pemerintah Daerah itu sendiri menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah.
2. Pengaturan hubungan keuangan pusat-pusat yang lebih didasari oleh "itikad" untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan sebaliknya).
3. Perubahan perilaku elit local dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka suda merupakan konsekuensi logis pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, maka untuk mengulangi hal tersebut di bawah peranan seseorang pemerintah atau pemimpin pemerintah di semua tingkat adalah sangat menentukan sukses tidaknya pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, demikian pula halnya di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagaimana dikemukakan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : pertama, untuk mengetahui bagaimana peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Kedua, untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peran Camat sebagai koordinator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan dilaksanakan pada Bulan Mei 2021.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Pengambilan sample dalam kegiatan ini berdasarkan metode pengambilan sample yang tidak diacak yaitu purposive sampling.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua unsure dalam pemerintahan Kecamatan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang memahami peranan Camat selaku koordinator pembangunan, yang terdiri dari Lurah, Ketua LPM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RW, Ketua RT, Pegawai Kantor Camat.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu: cara memperoleh data dengan mempelajari literatur-literatur, laporan-laporan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan teknik :
 - a. Observasi yaitu pengamatan tentang kejadian yang berhubungan dengan Peranan Camat selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan mempergunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini dilakukan agar dapat menjangkau informasi tentang Peranan Camat selaku Koordinator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konda adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas, wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Kota Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wolasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Moramo utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto

Peranan Camat Selaku Administator di Kecmatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

1. Administator Pemerintahan

Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, yaitu membahas tentang tinjauan pustaka, maka suda dapat kita pahami tentang ruang lingkup tugas Camat sebagai administator pemerintahan yang meliputi dari pada fungsi-fungsi pokok manajemen dalam rangka melaksanakan tugas peerintahan umum yang didasarkan atas azas dekonsentrasi serta urusan rumah tangga daerah.

Sebagai mana dalam latar belakang terdahulu bahwa jika kita amati tugas serta wewenang camat sebagai adaministator pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan adalah sangat luas, maka tentu saja karena luasnya bidang tugas tersebut berarti juga ingin menguraikan secara keseluruhan, karena mengingat keterbatasan waktu, maka uraian peranan Camat Konda dalam bidang pemerintahan ini tidak dapat terjangkau secara keseluruhan. Oleh karena itu, teknik penyajian yang digunakan hanya sebagai pelaksana urusan kewenangan camat.

Sebagaimana yang diruainkan dalam hak dan kewenangan pemerintah serta kewajiban kepala wilayah, maka usaha-usaha pemerintah Kecamatan Konda dalam melaksanakan peranannya sebagai adaministator pemerintahan ini wawasan akan dititik beratkan kepada pembinaan pemerintah desa/ kelurahan, pembinaan keamanan dan ketertiban serta pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Ketiga usaha tersebut akan saya uraikan persatu sebagai berikut:

a. Pembinaan pemerintah Desa/ Kelurahan

Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan Desa/ Kelurahan, maka Camat Konda sebagai administator pemerintahan telah mengusahakan penerapan berbagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang pemerintahan di daerah. Maka dalam hubungan ini pemerintah dalam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan di wilayahnya telah menata organisasi pemerintah Desa/Kelurahan yang ada di wilayahnya. Penataan tersebut dilakukan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan Perangkat Lurah.

Sedangkan penataan organisasi pemerintahan kelurahan diusahakan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1984 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan kelurahan. Dari usaha penerapan kedua peraturan Menteri tersebut, maka Kecamatan Konda Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara telah tersusun baik, bila menyangkut tentang struktur maupun pengisian formasinya, dan telah diikuti dngan usaha pembinaan lebih lanjut.

Dalam upaya pembinaan lebih lanjut tentang pola organisasi pemerintahan Desa, terutama yang mengenai personil penduduknya, maka Camat Konda dalam setiap pengarahannya Ia selalu menekankan agar masing-masing unsur dapat mengetahui kedudukannya di dalam organisasi dengan harapan agar setiap pihak mengetahui hak, wewenang serta kewajibannya. Karena dengan mengetahui hak, wewenang dengan kewajiban maka berarti mereka mengetahui pula tentang tata aliran kerja dan jalur pertanggung jawabannya masing-masing unsur.

Dalam setiap pengarahannya, Camat Konda selalu menekankan agar Lurah sebagai unsur pimpinan di wilayah, Sekretaris Lurah sebagai unsur staf/ pembantu pimpinan serta Ketua ORW/ ORT sebagai unsur pelaksana masing-masing mengetahui serta menyertai tentang hak, wewenang serta kewajibannya di wilayah daerah masing-masing, karena dengan hal demikian maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya program pada setiap kelurahan.

Sedangkan dalam usaha penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Kelurahan, maka Camat Konda selalu mengusahakan agar selalu mengarahkan untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang dianggap dapat menjadi sumber pendapatan asli kelurahan, misalnya dari tanah kas kelurahan, sedangkan menyangkut tujuan dari pada program ini adalah titik lain agar betul dapat dan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, karena mengingat kedudukannya sebagai daerah otonom. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
	Baik	55	55 %
	Kurang baik	36	36 %
	Tidak baik	9	9 %
	Jumlah	100	100

Sumber : Hasil Wawancara Responden.

Dengan berpedoman pada tabel di atas, maka nampaklah bahwa responden yang menanggapi baik adalah sebanyak 55 orang (55%), yang menanggapi kurang baik adalah 36 orang (36%) sedangkan yang menanggapi tidak baik adalah sebanyak 9 orang (9%).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan pemerintah kelurahan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data tanggapan responden yang mengatakan baik mencapai 55 orang (55%) dari sampel yang diambil sebanyak 100 orang atau dengan kata lain bahwa yang mengatakan kurang baik adalah 36 orang (36%).

b. Pembinaan keterampilan/ ketertiban

Dalam membina ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu fungsi dan setiap pemerintah di semua tingkatan. Oleh karena itu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sebagai kepala wilayah yang menempati posisi terdepan dalam hirarki pemerintahan dan ketertiban di wilayahnya, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif mengatasi setiap gangguan keamanan yang sedang terjadi.

Tindakan preventif dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban di dalam wilayahnya dilakukan dengan tindakan keramaian, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat. Maka dalam hubungan ini pemberian izin keramaian dilakukan dengan terlebih dahulu meminta rencana acara yang akan dilakukan, terhadap hal-hal yang dianggap dapat memberikan kemungkinan terjadinya gangguan keamanan atau ketentraman di dalam wilayah, maka Camat untuk diadakan bagian acara tersebut dengan jalan tidak memberikan izin.

Sedangkan tindakan represif terhadap gangguan keamanan yang terjadi dan bersifat kriminal, perdata maupun bersifat pidana yang diajukan oleh kepala kelurahan karena tidak dapat diselesaikan maka Camat Konda mengusahakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih itu.

Tetapi apabila usaha perdamaian sudah tidak mungkin dilakukan lagi barulah pemerintah menyampaikan kepada pihak lain yang berwajib yaitu pihak kepolisian setempat untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.

Di samping itu usaha Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana seperti kebakaran, maka pemerintah mengajukan kepada Lurah agar perkampungan-perkampungan yang padat perumahannya untuk menyediakan alat pencegah kebakaran, seperti: pasir karung dan alat-alat lain yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika terjadi kebakaran.

Berkenaan dengan tugas-tugas tersebut, Camat Konda sebagai pemegang fungsi ketentraman dan ketertiban di wilayahnya, juga telah membentuk suatu komponen-komponen keamanan lingkungandalam setiap Desa dan Kelurahan yang beranggotakan Hansip yang disertai tugas megatasi, mengamati serta melaporkan apa yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya suatu keamanan yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah masing-masing. Keamanan lingkungan yang dilaksanakan itu bukan hanya mengawasi gangguan keamanan yang timbul dari masyarakat, akan tetapi juga keamanan yang ditimbulkan oleh alam seperti banjir. Dengan berbagai tindakan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh Camat sebagai kepala wilayah kecamatan, jika diamati keadaan serta situasi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dari segi keamanan dan ketertibannya, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan merupakan suatu wilayah yang keamanan dan ketertibannya sudah terjamin, hal ini dikatakan karena dimana tingkat kejahatan dan persengketaan sangat rendah. Dalam hal tersebut, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kejahatan Persengketaan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tinggi	72	72 %
2	Sedang	20	20 %
3	Rendah	8	8 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden yang mengatakan tingkat kejahatan/ persengketaan itu tinggi sebanyak 72 orang (70%), yang mengatakan sedang sebanyak 20 orang (20%), sedangkan yang menanggapi bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan adalah rendah sebanyak 8 orang (8%).

Dengan berdasarkan pada data-data tersebut, maka responden yang mengatakan bahwa tingkat kejahatan/ persengketaan Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan adalah cukup rendah dalam arti dapat menyelesaikan berdasarkan prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

c. Pembinaan politik dan kesatuan bangsa

Dalam pembinaan politik dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Camat Konda di dalam suatu tindakan, mengingat kedudukan kepala wilayah sebagai pemimpin pemerintahan yang disertai tugas agar selalu berusaha untuk mewujudkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena dengan demikian kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan juga semakin meningkat.

Menyadari hal tersebut di atas, Camat Konda dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah yang melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan dan pembinaan politik dan kesatuan bangsa termasuk salah satu tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, maka wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan telah berupaya akan berbagai macam bentuk pembinaan kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sehingga dengan demikian harapan untuk berpartisipasi dalam pembangunan meningkat.

Camat Konda dalam usaha pembinaan politik dan kesatuan bangsa disamping melaksanakan pembinaan dalam bentuk penyuluhan hukum, karena penyuluhan seperti ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan perpaduan program Hakim Masuk Desa bersama-sama dengan POLRI yang didampingi oleh Kepala Hukum Sekretaris Kabupaten Konawe Selatan. Program ini diharapkan agar setiap persoalannya diselesaikannya melalui prosedur hukum, oleh karena itu penyuluhan ini masyarakat diarahkan untuk mengetahui tindakan hukum bagi mereka yang sering melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan persoalannya, maka demikian pula halnya penyuluhan juga diarahkan agar warga masyarakat mengetahui anjuran-anjuran serta petunjuk-petunjuk pemerintah seperti dalam kewajiban membayar pajak, menjaga kelestarian hutan terhadap penebangan hutan secara sembarangan, pembakaran hutan sert hal-hal lain yang dapat berakibat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan pengarahan atas kewajiban masyarakat terhadap pemerintah negara, maka penyuluhan hukum juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur penuntun bagi yang mendapat perlakuan sewenang-wenang baik oknum aparat pemerintahan itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat seperti perampasan hak, penipuan serta hal-hal lain yang terjadi dan tidak sesuai dengan harta dan martabat sebagai manusia dan masyarakat Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian Camat dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dengan harapan agar daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian diatas, tentang peranan Camat sebagai administrator pemerintahan, maka untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana Camat Konda dalam melaksanakan tugas tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	70	70 %
2	Kurang baik	20	20 %
3	Tidak baik	10	10 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden.

Pada tabel di atas, maka nampak bahwa tanggapan responden menunjukkan bahwa yang menanggapi baik adalah 70 orang (70%), kemudian yang menanggapi kurang baik adalah 20 orang (20%), dan yang menanggapi tidak baik sebanyak 10 orang (10%).

2. Administrator Pembangunan

Camat Konda dalam melaksanakan wewenang koordinasi yang ada padanya telah dilakukan yang bersangkutan. Mengusahakan adanya laporan-laporan dari Instansi/ Dinas, mengusahakan musyawarah, konsultasi secara kunjungan. Dalam hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat Konda menyangkut tentang persiapan/ penentuan tujuan dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan mengatakan bahwa

“Dalam rangka persiapan/ penentuan tujuan dari berbagai program yang ada di wilayah selalu didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, seperti halnya dalam perencanaan pembangunan desa”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan pembangunan desa dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem perencanaan yang sering digunakan yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas ke bawah, yang mana dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut masing-masing mempunyai tahapan tertentu.

Adapun tahapan-tahapan perencanaan dari bawah ke atas itu adalah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan pada masing-masing kelurahan yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunann kelurahan tersebut, partisipasi daripada masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana kepada pihak pembuat rencana.

Data-data diperoleh dari masyarakat adalah merupakan masukan atau bahan dalam membuat perencanaan pada tingkat kelurahan melalui musyawarah LMD. Hasil

musyawarah tersebut merupakan keputusan kelurahan yang sekaligus menjadi rencana program pembangunan kelurahan, yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kecamatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peranan Camat sebagai administrator pembangunan di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Pelaksanaan Peranan Pemerintah sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	78	78 %
2	Kurang baik	18	18 %
3	Tidak baik	4	4 %
Jumlah		100	100

Sumber: Hasil Wawancara Responden,

Dari tabel tersebut di atas, nampaklah bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik adalah 78 orang (78%), yang mengatakan kurang baik yaitu 18 orang (18%) dan yang menanggapi tidak baik adalah 4 Orang (4%).

Jika diamati secara baik tentang tanggapan tersebut di atas, maka nampaklah bahwa tanggapan yang mengatakan kurang baik meningkat dibandingkan dengan tanggapan terdahulu di bidang pemerintah. Berdasarkan pengamatan kurang baik dan tidak baik yaitu pada umumnya hal ini jika kita hubungkan dengan program pembangunan diuraikan terdahulu adalah agak bertentangan, melihat padatnya serta lancarnya pelaksanaan pembangunan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Konda sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi pelaksanaannya belum begitu merata ke seluruh polsek kelurahan.

3. Administrator Kemasyarakatan

Berdasarkan kedudukan Camat sebagai administrator kemasyarakatan dalam arti membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, berdasarkan hal tersebut maka kepala wilayah pada setiap tingkatan haruslah memegang peran pembinaan.

Peranan pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai makhluk individu dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa kata pembinaan itu terkandung arti sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai usaha dalam rangka mewujudkan atau meningkatkan apa yang kurang terbina dan kurang meningkat.

Pembinaan masyarakat semakun sering artinya jika kita telah menyadari bahwa pembangunan pada dewasa ini selalu menuntut tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yaitu di mana tanggung jawab masyarakat adalah untuk berperan serta atau berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat selalu diupayakan, baik kepada masyarakat maupun kepada anggota masyarakat yang ada di dalam organisasi kemasyarakatan seperti halnya Karang Taruna sebagai motor penggerak dari berbagai kegiatan yang ada di kelurahan. Kesempurnaan kepengurusan ini sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk berpartisipasi khususnya di pedesaan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Camat Konda dalam kedudukannya sebagai penguasa tunggal dan administrator kemasyarakatan telah berupaya mengadakan penyempurnaan kepengurusan LPM dari wilayahnya.

Faktor Penghambat Camat dalam Melaksanakan Peranannya selaku Administrator Pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tinjauan tidak selamanya dapat bersejalan dengan lancar, akan tetapi sering pula diperhadapkan kepada berbagai masalah, maka atas dasar itulah kita perlu menyadari bahwa Camat Konda didalam melaksanakan tugasnya baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan selalu diikuti dengan berbagai masalah yang merupakan hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas yang sedang

dikelolanya. Untuk secara garis besarnya masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Camat Konda adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya dana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi camat

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris camat Konda bahwa dana yang menjadi masalah dalam melaksanakan tugasnya, karena dana yang tersedia untuk berbagai usaha baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun di bidang kemasyarakatan sangat terbatas sekali dibanding dengan banyaknya yang harus dibiayai sehingga penyelenggaraan tugas sering terlambat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan dana yang dibutuhkan, maka usaha-usaha yang harus dilakukan dengan jalan meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat setempat untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun lingkungannya sendiri. akan tetapi dengan jalan demikian untuk meminta partisipasi masyarakat selalu tersendat-sendat, ini dilatar belakangi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti daripada pembangunan. Oleh karena itu Camat Konda selalu berikhtiar di dalam berbagai bentuk dan berbagai cara dan metode untuk menndapatkan dana dalam rangka membiayai berbagai program kerja yang akan dilaksanakan, agar mencapai daya guna dan hasil yang semaksimal.

2. Terbatasnya waktu yang akan digunakan

Camat Konda dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan Moramo yang merupakan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat di segala bidang dalam wilayahnya, ia selalu diperhadapkan kepada keterbatasan waktu untuk menyelesaikan semua program kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena volume kerja yang semakin meningkat dan mempunyai rencana pembangunan dalam berbagai sektor sehingga waktu yang akan digunakan itu untuk menyelesaikan tidak tepat pada apa yang diharapkan sehingga suatu pekerjaan sering terlambat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Camat Konda dalam mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan berbagai program, maka ia mengadakan usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh aparat pemerintah yang ada di wilaya Kecamatan Moramo untuk bersama-sama menangani berbagai bentuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta membina masyarakat.
- b. melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam berbagai program kerja baik yang telah direncanakann oleh pihak pemerintah Kecamatan Moramo maupun program kerja yang telah dibuat oleh pihak Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Membuat program kerja sesuai dengan rencana kerja dan dapat diselesaikan pada setiap hari.
- d. Membuat jadwal penyelenggaraan derta penyelesaian suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dengan adanya usaha-usaha tersebut diatas, maka diharapkan agar hambatan-hambatan, yyang disebabkan oleh karena terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan serta tugas-tugas lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan lebih dapat diatasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peranan Camat sebagai Asministrator pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dan menempati posisi sentral dalam mensukseskan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan karena ruang lingkup tugasnya meliputi fungsi-fungsi manajemen yang harus menjamin untuk mencapai suksesnya tugas pemerintahan.
2. Dana dari pemerintah kabupaten masih sangat minim untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.
3. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan program kerja yang ada di Kecamatan Konda hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara volume kerja dengan waktu yang tersedia..

E. Referensi

- Ansyory, M. (2000). *Sosiologi Pedesaan*. Ujungpandang: IAIN Alauddin.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prktik*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Brathos, B. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Biro Bina Pemerintahan Daerah, Petunjuk Penyelenggaraan Desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.
- George R. T. (1998). *Prinsip-prinsip Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hadikusumo, D., & Sumitro. (1993). *Ekonomi Pembangunan*. Cet. Ll; . Jakarta: PT. Pembangunan.
- Halsey, G. D. (1999). *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kansil, C. S. T. (1999). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru.
- Kartono, K. (2001). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kunarjo. (1999). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Sajogyo, (1980). *Menuju Partisipasi Mendasar Golongan Petani Dalam Dasa Warsa 1980 - an; Sebuah Tanggapan Atas Kerja Induk EKTi Pada Seminar Petani Buruh YTKI / PPSM, Jakarta*.
- Salim, E. (1977). *Pembangunan Masyarakat Desa (Rural Development) di Indonesia dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryaningrat, B. (1999). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. (1999). *Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah*. Jakarta: Fakto.
- Tjokroamidjojo, B, (2000). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- _____, (2001). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.